BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁰

Perlindungan Hukum pada dasarnya merupakan unsur yang sangat penting karena untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat penting serta menjadi konsekuensi

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

¹⁹ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun serta mewujudkan keadilan.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan anak adalah orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk peraturan dari negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menerapkan

sistem keadilan restorative, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sistem peradilan pidana anak juga mengenal istilah diversifikasi yaitu dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Melaksanakan perlindungan hukum yang sesuai dengan asas-asas pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Indonesia merupakan negara hukum maka perlunya proses penegakan hukum demi pelaksanaan kewajiban terhadap keadilan dalam menoreh perlindungan hukum terhadap korban atau pelaku tindak pidana, namun tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dalam artian tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntut di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, sehingga perlu adanya proses pengaduan terlebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat di proses menurut hukum dan mendapatkan kepastian hukum.

Setiap negara punya konsep dasar yaitu berupa memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya maka dari itu yang bersifat universal, perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik itu kelompok maupun individu dapat menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kejahatan. Fungsi hukum antara lain untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemakmuran. Wujud perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan kesehatan atau pendampingan psikologi, rehabilitasi sampai dengan pemulihan dan bantuan hukum.

Upaya perlindungan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian dan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Salah satu perlindungan yang diberikan LPSK yaitu pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana yang lebih lanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Yang didalamnya mengatur mengenai korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan korban anak mendapatkan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau atas ganti kerugian atas penderitaan sebagai

akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut neoklasik artinya menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan dan mental. Demikian dimungkinkan aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggung jawaban didalam hal khusus seperti adanya gangguan jiwa atau gila, dan dibawah umur. Maka dapat di ketahui pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berorientasi kepada pelaku, padahal korban adalah orang yang mengalami penderitaan akibat ulah perbuatan pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku lebih di pertimbangkan akibat yang diderita oleh korban dan keluarga korban dalam kerugian immateril, apabila berkaitan dengan pelaku tidak mampu bertanggung jawab maka korban juga dimungkinkan untuk mendapatkan kompensasi. Kemudian jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengaturan mengenai korban pada Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai hak untuk mengajukan laporan atau disebut pengaduan kepada kepolisian secara lisan maupun tertulis atas tindak pidana dialami. Dalam pasal ini, korban hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja. Sehingga kedudukan korban yang melaporkan

kejadiannya kemudian hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja membuat mereka menjadi korban yang kedua kali. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²¹

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.²² Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan :

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”²³

B. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut *R. La Porta* dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman

²¹ Arif Gosita, Op-cit., hlm. 19

²² Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume II N0.2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan, 1998, hlm. 3.

²³ Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prospek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, hlm. 22.

(*sanction*).²⁴ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

²⁴ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", Journal of Financial Economics, no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

Dengan adanya bentuk perlindungan hukum preventif mampu meningkatkan kesadaran akan dampak kekerasan setelah mensosialisasikannya serta, menginformasikan kepada publik bahwa kekerasan merupakan suatu pelanggaran hukum dan setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana, dan dalam perlindungan hukum tentu salah satu faktor yang mendukung pelaksanaannya adalah penegak hukumnya itu sendiri pada saat menangani kasus kekerasan yang di adukan oleh warga negara. Perlindungan hukum represif yang diberikan dapat di rasakan oleh warga negara yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis korban, dan memberikan efek jera kepada pelaku dengan memberikannya sanksi pidana atas perbuatan tindak pidana yang ia lakukan.

Dalam mencapai perlindungan hukum yang berkeadilan menurut dalam isi Undang-Undang 1945 Republik Indonesia tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari perlindungan hukum, faktor-faktor perlindungan hukum yaitu:

1) Faktor hukum

Undang-Undang merupakan bentuk fisik dari peraturan hukum tertulis yang memuat peraturan-peraturan tentang perlindungan anak yaitu

²⁵ Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas SebelasMaret, Surakarta. 2003, hal 20

yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena banyaknya permasalahan yang muncul seiring perubahan zaman membuat adanya perubahan pada beberapa ketentuan Undang-undang yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2) Faktor Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum atau Kepolisian Republik Indonesia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi, mereka mempunyai kedudukan dan peran sangat penting apakah sistem penegak hukum dapat berjalan dengan semestinya atau tidak.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam menegakkan hukum peraturan perundang-undangan, sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung dalam menjamin kelancaran suatu proses hukum.

4) Faktor Masyarakat

Peran masyarakat adalah sebagai pematuh perundang-undangan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum salah satu dari indikator berfungsinya hukum yang relevan. Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan semua element yang ada, baik itu masyarakat sebagai pihak yang terlibat maupun pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan tersebut.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dan kesadaran masyarakat saling berhubungan adanya kebudayaan atau sistem hukum meliputi nilai dasar hukum yang berlaku, dan memiliki konsep abstrak terkait apa yang dianggap baik dan karenanya di patuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan pendampingan lembaga perlindungan hukum, setiap anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual atau menjadi pelaku kekerasan seksual berhak memiliki privasi atau dirahasiakan sebagaimana tercantum di dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu setiap anak yang menjadi korban atau anak berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan secara non litigasi berupa perlindungan fisik atau jaminan kesehatan. Kemudian perlindungan psikis atau mental untuk menghilangkan trauma dan gangguan sikologis dengan adanya pemberian konseling oleh lembaga perlindungan hukum.

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat

bersumber pada konsep- konsep “Rechtstaat” dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁶

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu Tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁷ Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:²⁸

²⁶ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.* Surabaya. PT Bina Ilmu., h. 38.

²⁷ Yassir Arafat, 2015, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember.* Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. h., 34.

²⁸ Ibid.

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari

sengketa dan upaya- upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

D. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) seperti hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³⁰ Konsep penegakan hukum yang

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 21.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 21.

bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.³¹

E. Pengertian Anak Korban

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak merupakan generasi penerus cita-cita dari perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara pada masa yang akan depan. Bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban atas ikut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan hak anak. Anak belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka perlu mendapatkan perlindungan dari orang dewasa atas berbagai tindakan kejahatan maupun diskriminasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak

³¹ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal. 79.

disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan I atau tujuan tertentu.

Menurut *World Health Organization* (WHO) definisi anak adalah dihitung sejak seseorang didalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan batas usia pertanggung jawaban pidana yang baru bagi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

F. Hak dan Kewajiban Anak

Hak adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban. Sedangkan kewajiban melindungi anak merupakan bagian penting dalam bernegara. Dalam konteks Indonesia, melindungi dan memenuhi hak-hak anak termasuk dengan cara membangun intitusi independen perlindungan hak anak, setidaknya beranjak dari 3 (tiga) rasional yaitu:

Pertama, kondisi situasional anak di Indonesia yang sedemikian rupa rentan dan mengalami eksploitasi, kekerasan seksual, penyalahgunaan, penelantaran bahkan impunity.

Kedua, sejumlah peraturan hukum dan konstitusional yang berlaku di Indonesia menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan anak.

Ketiga, adanya komitmen, keterikatan hukum dan politik bagi Indonesia sebagai masyarakat dunia internasional untuk memenuhi, mematuhi dan mengharmoniskan instrumen-instrumen internasional. Muhammad Joni, dalam makalahnya yang berjudul “*Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual di Lingkungan Pariwisata.*”

Pada dasarnya, hak anak adalah hak asasi manusia. Hak anak, seperti yang digambarkan oleh konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak pada dasarnya menyangkut hak-hak yang melekat pada anak sebagai karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, tak seorangpun, tak satu organisasipun, termasuk perusahaan ataupun negara berhak mencabutnya. Sebaliknya hak-hak yang melekat pada anak wajib dijaga dan dipenuhi serta diproteksi oleh negara dan masyarakat. Secara sederhana apa yang dimasukkan ke dalam hak anak adalah merupakan hak-hak yang wajib diberikan oleh negara kepada anak. Negara wajib menyadarkan, memantau dan membuat kebijakan agar semua warga negara memahami, melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

Sebagai kewajiban anak yang harus dilakukan oleh anak adalah:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai Keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia.

G. Kekerasan Seksual

Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri-ciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan perbuatan seseorang yang merugikan orang lain dengan mengakibatkan cedera fisik, luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Adanya unsur berupa paksaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Menurut John M. Echols istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.³²

Mengenai masalah kekerasan seksual atau perkosaan menunjuk kekerasan pada objek fisik maupun psikologis, bentuk perangsangan secara fisik seperti melukai, menimbulkan cacat atau ketidak normalan pada fisik tertentu. Kekerasan pada fisik seseorang bisa berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis, orang yang menjadi korban kekerasan seksual telah mengalami paksaan atau dengan kekerasan fisik dapat

³² John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

mengalami gangguan psikologis yang cukup parah seperti stres, depresi dan akhirnya memilih untuk bunuh diri.

Modus kekerasan seksual merupakan wujud dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk kekerasan yang masih terus terjadi di tengah masyarakat memiliki akibat atas kerugian orang lain. Kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, perkosaan terhadap anak dibawah umur. Kerugian secara fisik maupun non fisik yang berlangsung terus, dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Kekerasan seksual menjadi problem nasional hingga internasional.

Kekerasan seksual adalah perbuatan menyimpang karena dilakukan dengan cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama. Bentuk kekerasan dilakukan untuk membuktikan pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat dari korban sehingga dijadikan alat untuk melakukan usaha kejahatannya, adanya kekerasan seksual terjadi merugikan pihak korban maka penderitaan bagi korban kekerasan seksual telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian khusus. Adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi bagian dari perbuatan melanggar hukum dan norma. Unsur keterpaksaan dalam persetujuan pada wanita biasanya didahului oleh perlawanan sebagai bentuk penolakan atau ketidak setujuannya.

Kekerasan yang menimpa korban berdampak pada merugikan fisik namun juga mental psikologisnya, kondisi yang buruk ini membuat

korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk pada persoalan penegakan hukumnya. Bukan tidak mungkin korban menjadi takut melaporkan kasus yang menimpanya karena khawatir ancaman dari pelaku dan malu diketahui masyarakat sekitar korban ini yang menjadikan sulitnya juga aparat melakukan pembuktian. Kesulitan mencari bukti tentang adanya kasus seksual tentunya tidak akan sulit, apabila korban perkosaan langsung melaporkannya, hal ini dimaksudkan pada pembuktian dari adanya kasus pemerkosaan. Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan terjadinya kasus pemerkosaan maka bukti-bukti tersebut tidak dapat diketahui oleh penyidik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi

penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, inti dari kekerasan seksual terletak pada “***ancaman***” verbal dan “***pemaksaan***” sebagai tindakan. Kata ancaman

dan pemaksaan dapat di temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam Pasal 285 dan Pasal 289, didalam Pasal 285 disebutkan:

Pasal 285

Bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Dalam Pasal 289 mengatakan:

Pasal 286

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaseseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan yang melanggar kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi

kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba- raba bagian kemaluan, meraba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk dalam pengertian ini.

Adanya unsur mengancam, memaksa, memperkosa dapat di pahami bahwa ancaman atau mengancam suatu tindakan yang menakut- nakuti agar Tindakan pelaku sesuai dengan keinginannya, memaksa adalah suatu perintah mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku dengan mengharuskan korban mengerjakan yang diinginkan oleh pelaku misalnya menyentuh organ sensitif korban tanpa persetujuan korban, dan perkosa adalah perbuatan persetubuhan dengan paksa.

Pencucian uang dari hasil Lingkup Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi tindak pidana:

- 1) Perdagangan Orang;
- 2) Penyeludupan manusia;
- 3) Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga;
- 4) Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
- 5) Perjudian dan prostitusi;
- 6) Adopsi ilegal;
- 7) Pornografi dan pornoaksi;
- 8) kejahatan diatas;
- 9) Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
- 10) Perlindungan korban, keluarga, saksi, dan teman; dan
- 11) Kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak.

H. Macam-Macam Kekerasan Seksual

Collier berpendapat bahwa pelecehan seksual yang terjadi ke perempuan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adanya koitus, sementara yang kedua yaitutanpa koitus. Dengan adanya koitus maka suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang lain. Sementara yang dimaksud

dari tanpa adanya koitus adalah tindakan yang tidak berakibat petaka pada fisik korban, pun juga tidak melakukan penganiayaan, tidak melakukan pelecehan secara verbal seperti suitan atau ucapan yang tidak senonoh, tatapan yang tidak etis, sentuhan/rabaan fisik (tanpa ada kekerasan) di badan korban. Pelecehan seksual dapat berupa komentar verbal, gerakan tubuh maupun kontak fisik yang bersifat seksual yang sengaja dilakukan seseorang dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh korban.³³

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi (2001), membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire* (SEQ):

- a. *Gender Harassment* adalah perkataan maupun suatu perilaku dengan niat bersifat menjatuhkan harga diri.
- b. *Seductive Actions* adalah ajakan seksual yang dilakukan dengan tidak memaksa, namun berupa bujukan yang dirasa ofensif, tidak bermoral, atau merendahkan.
- c. *Sexual Douceur* adalah tindakan yang dilakukan dengan menyuap untuk memenuhi segala hal yang mengarah ke seksual dengan menjanjikan sesuatu.
- d. *Sexual Duress* adalah suatu tindakan yang menekan dimana hal itu diiringi dengan ultimatum untuk menunaikan hal-hal yang mengarah ke seksual.
- e. *Sexual Attack* adalah tuntutan atau paksaan yang mengarah ke

³³ Shapitri M.S. Regang. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Manado. Jurnal Lex Crimen. Vol. VII No. 7. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Hal. 77.

seksual dengan kasar.

Sementara menurut Kelly (1988), pelecehan seksual dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Visual yaitu dengan tatapan mesum, tatapan yang mengintimidasi, perangai yang cenderung seksual.
- b. Verbal yaitu berupa suitan, kelakar seksual, gosip, pernyataan yang mengintimidasi secara langsung atau tersirat.
- c. Fisik yaitu dengan menjamah, meremas, mencubit, menepuk-nepuk, merengkuh dengan sengaja.